

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai anggaran pemerintah adalah instrumen pengelolaan keuangan negara. APBN memiliki fungsi sebagai alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, serta alat untuk menciptakan ruang. Sebagai alat kebijakan fiskal, APBN berfungsi mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan target dan stabilisasi perekonomian, meningkatkan pendapatan negara, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan nasional. APBN terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan merupakan estimasi semua penerimaan negara yang diperkirakan akan diterima dalam satu tahun anggaran. Semua penerimaan negara berasal dari sumber-sumber pendapatan yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang APBN tersebut.

Pendapatan negara umumnya dibagi dalam dua kelompok besar yaitu penerimaan dalam negeri dan hibah. Hibah dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri sedangkan penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah. Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, pengenaan PNBP berlaku atas objek pemanfaatan sumber daya alam, objek pelayanan, objek pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, objek pengelolaan barang milik negara, objek pengelolaan dana, dan objek hak negara lainnya.

PNBP yang berasal dari pelayanan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan salah satunya yaitu pelayanan pendaftaran hak tanggungan termasuk dalam pengenaan PNBP objek pelayanan. Pelayanan pendaftaran hak tanggungan diatur di dalam prosedur pendaftaran mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan sertifikat hak tanggungan. Proses pelayanan ini dilakukan di Kantor Pertanahan setempat di wilayah masing-masing di mana lokasi suatu objek tanah berada.

Secara organisasi administratif, Kantor Pertanahan berada di bawah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dengan atasan langsungnya yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kantor Wilayah berkedudukan di provinsi dengan jumlah sebesar 33 kantor yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Sedangkan Kantor Pertanahan berkedudukan di kabupaten/kota dengan jumlah sebanyak 479 kantor yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kantor Pertanahan Kota Bogor merupakan salah satu kantor yang berkedudukan di Kota Bogor dan menangani segala permasalahan administrasi dan pelayanan pertanahan dari 6 kecamatan dengan 68 kelurahan di lingkup Kota Bogor.

Berdasarkan ulasan di atas, penulis tertarik mengambil judul tugas akhir **"Prosedur Pendaftaran Hak Tanggungan dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Pertanahan Kota Bogor"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prosedur pendaftaran hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Bogor?
2. Apa saja kendala yang terjadi dalam prosedur pendaftaran hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Bogor?
3. Bagaimana sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam prosedur pendaftaran hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Bogor?
4. Bagaimana kontribusi PNBPN pendaftaran hak tanggungan terhadap total PNBPN periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021?

1.3 Tujuan

Penulisan tugas akhir di Kantor Pertanahan Kota Bogor bertujuan untuk:

1. Menguraikan pelaksanaan prosedur pendaftaran hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Bogor.
2. Menguraikan kendala dalam prosedur pendaftaran hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Bogor.
3. Menguraikan sistem pengendalian internal dalam prosedur pendaftaran hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Bogor.
4. Menguraikan kontribusi PNBPN pendaftaran hak tanggungan terhadap total PNBPN periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

1.4 Manfaat

Hasil penulisan laporan tugas akhir diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Penulis dapat menambah pengalaman dalam dunia kerja yang menghasilkan laporan tugas akhir juga sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar ahli madya dan penulis dapat menambah wawasan tentang hak tanggungan yang meliputi pengertian, prosedur serta kontribusi nilainya terhadap penerimaan PNBPN.
2. Bagi Instansi
Hasil laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi terkait kontribusi nilai hak tanggungan dalam penerimaan PNBPN selama kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2021 dan kontribusi PNBPN pendaftaran hak tanggungan terhadap total PNBPN.
3. Bagi Pembaca
Diharapkan dengan membaca laporan tugas akhir ini dapat semakin menambah pengetahuan dan wawasan pembaca pada umumnya dan masyarakat pengguna layanan pendaftaran hak tanggungan pada khususnya tentang prosedur pendaftaran hak tanggungan khususnya di Kantor Pertanahan Kota Bogor.